

e-news letter

NOV III 2019

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Sukamta, Ph.D

Perlu Langkah Nyata Untuk PALESTINA

Berhasil Desak DK PBB
Tegaskan Status Ilegal
Pemukiman Israel di Palestina

Fraksi PKS DPR RI Apresiasi
Diplomasi Indonesia





"Apresiasi untuk diplomat kita di PBB dibawah Duta Besar Dian Triansyah Djani yang akhirnya berhasil mendesak DK PBB berbicara dengan mandat penuh guna menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Paleatina. Ini langkah politik yang penting untuk menjaga marwah hukum internasional tetap dihormati bangsa-bangsa,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina

**Dr. ABDUL KHARIS A,
SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



PKS Apresiasi Pemerintah RI

Berhasil Desak DK PBB,
Terkait Status Ilegal
Pemukiman Israel

"Saya mengajak seluruh Parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang di dukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat 'fractured' solusi damai antar keduanya

Dr. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI



Indonesia Harus Ambil Langkah Kongkrit Selamatkan Rakyat Palestina

Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai Rakyat Indonesia kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril, Pemerintah Indonesia bahu membahu bersama Rakyat Indonesia salurkan bantuan untuk Rakyat Palestina”

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (19/11) — Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari mengemukakan keras serangan militer Zionis Israel yang kembali digencarkan ke Gaza, Palestina pada 13 November 2019 hingga hari ini.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengemukakan kebiadaban Israel terhadap Rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, segala tindakan kebiadaban Israel disana tidak dibenarkan sama sekali, termasuk yang baru-baru ini membombardir Gaza ,

membunuh Anak-anak, Perempuan dan mematikan aliran listrik ke Rumah Sakit di Tepi Barat yang mengancam hidup pasien yang tengah dirawat, Israel biadab !” Tegas Kharis dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza sebagaimana diberitakan sejumlah media mengonfirmasi bahwa terdapat 32 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, yang gugur akibat serangan militer zionis

tersebut. Pasukan Militer Israel (IDF) beralih mengebom target Palestinian Islamic Jihad (PIJ), termasuk markas militer Hamas di Khan Younis dan pabrik senjata yang justru menjadikan Rakyat Sipil Palestina sebagai korban kebiadaban Zionis.

Kharis meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes ke PBB terkait langkah militer Israel tersebut.

“Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai Negara anggota PBB dan juga Anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas Umat Islam kita minta PBB agar melindungi Rakyat Palestina dari kesewenangan rezim Zionis penjajah tersebut, kalau perlu PBB kirim pasukan perdamaian kesana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya Zionis membunuh Rakyat Palestina” jelas Kharis yang merupakan legislator asal Solo itu.

Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang peduli terhadap Palestina, ia meminta Pemerintah untuk melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel dan



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si.Akt (Foto : dpr.go.id)

menghimbau masyarakat Indonesia untuk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.

“Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai Rakyat Indonesia kita harus membantu

meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril, Pemerintah Indonesia bahu membahu bersama Rakyat Indonesia salurkan bantuan untuk Rakyat Palestina”. Tutup Kharis.

Ketua Fraksi PKS DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza Palestina

Jakarta (15/11) - Israel kembali menggempur Gaza Palestina yang diklaim sebagai serangan balasan roket-roket kelompok militan Jihad Islam. Dikabarkan 32 meninggal di pihak Palestina (16 diantaranya warga sipil termasuk wanita dan anak-anak) sejak serangan Selasa. Bahkan satu keluarga dengan 6 orang anggotanya meninggal dalam serangan Kamis (14/11).

Ketua Fraksi PKS DPR mengecam serangan Israel yang menewaskan

n warga sipil Palestina tersebut sebagai tindakan yang biadab untuk sekian ratus kalinya.

"Ini untuk sekian ratus kali Israel tak memperdulikan korban jiwa warga sipil dan dunia tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengecam dan prihatin," kata Jazuli geram.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia tahu dan paham bahwa konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel akibat kebijakan pendudukan Israel atas tanah

Palestina.

"Kebijakan ini merupakan satu-satunya bentuk penjajahan di era modern yang masih langgeng akibat standar ganda negara-negara besar sekutu Israel sehingga Israel tak tersentuh hukum internasional," ungkap Jazuli geram.

Bersyukur sikap negara kita Indonesia sangat jelas, berpihak pada kemerdekaan bangsa Palestina. "Ini adalah amanat konstitusi dan utang sejarah Indonesia

yang mempelopori solidaritas bangsa-bangsa untuk merdeka melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955," tegas Jazuli.

Jazuli berharap dunia tidak lagi menutup mata atas tragedi kemanusiaan terbesar dan terlama sepanjang sejarah modern ini. Bersyukur gelombang protes atas pendudukan Israel mulai merebak di masyarakat dunia bahkan di negara-negara barat.

"Kita mengetuk

kesadaran dunia agar segala bentuk penjajahan dan tragedi kemanusiaan ini dapat dihentikan dengan cara dan sumberdaya sebesar apapun karena ini adalah tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai warga dunia," pungkask Jazuli

”

Kita mengetuk kesadaran dunia agar segala bentuk penjajahan dan tragedi kemanusiaan ini dapat dihentikan dengan cara dan sumberdaya sebesar apapun karena ini adalah tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai warga dunia

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Mardani Kutuk Serangan Udara Israel Ke Gaza

fraksi.pks.id | Jum'at 15 November 2019 | Image Istimewa



Saya mengutuk serangan Israel kepada warga Palestine di Gaza!

Saya mengajak seluruh parlemen di dunia untuk mengecam sikap bar-bar Israel kepada warga Palestine atas tindakan genosida, pembunuhan terencana dan perebutan tanah secara paksa sejak tahun 1967

Dr. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI



Dengan persenjataan yang sangat tidak seimbang, jika serangan Israel terus berlangsung maka yang akan terjadi adalah pemusnahan Palestina. Dunia Internasional harus menekan Israel untuk menghentikan serangan dan melaksanakan gencatan senjata yang telah disepakati,

Dr. H. SUKAMTA

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (16/11) — Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, mengancam keras serangan Israel yang kembali dilakukan ke kawasan Gaza Palestina pada Jumat pagi 15 November 2019.

Menurut Sukamta serangan ini dikhawatirkan akan semakin menambah korban warga sipil dan kerusakan sejumlah bangunan. Sebelumnya serangan yang dilakukan Israel 2 hari berturut-turut (Selasa - Rabu, 12-13

KOMISI I

Fraksi.pks.id | Sabtu 16 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

@fraksipksdprri

fraksipksdprri

fraksi.pks.id

Kecam Serangan Israel, Perlu Langkah Nyata Untuk Palestina

November 2019) dilaporkan oleh pihak Otoritas Palestina telah melukai 109 orang dan menewaskan 34 orang yang sebagiannya adalah warga sipil dan anak-anak.

"Dunia Internasional harus menekan Israel untuk menghentikan serangan dan melaksanakan gencatan senjata yang telah disepakati, pun beberapa pihak di Palestina perlu menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan. Keselamatan warga sipil di Gaza perlu menjadi prioritas. Dengan persenjataan yang sangat tidak seimbang, jika serangan Israel terus berlangsung maka yang akan terjadi adalah pemusnahan Palestina" jelas Sukamta.

Oleh sebab Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini berharap Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB dapat berperan secara maksimal untuk mendorong upaya pemulihara keamanan secara lebih permanen dengan mengupayakan menyelesaikan 2 persoalan utama di wilayah Palestina.

Persoalan pertama menurut Sukamta adalah

ketidakadilan yang dialami oleh warga Palestina dengan minimnya akses air yang sebagian besar dikuasai Israel, terbatasnya akses listrik, sempitnya mobilitas warga, serta minimnya sarana prasarana umum.

"Problem ketidakadilan ini jika tidak diatasi akan terus memicu panasnya situasi di perbatasan Israel - Palestina yang dibatasi oleh tembok pemisah. Indonesia melalui forum internasional perlu menggalang upaya nyata pembangunan di Palestina secara berkelanjutan"

Problem kedua adalah masih adanya perpecahan antar faksi dan kelompok di Palestina. Persoalan ini tentu akan menyulitkan upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina yang membutuhkan kekompakan seluruh pihak di Palestina dan juga dukungan dunia internasional. Dalam hal ini Sukamta berharap

pemerintah Indonesia dapat mengambil inisiatif mendorong upaya rekonsiliasi berbagai faksi di Palestina.

"Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan juga negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sangat strategis untuk melakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi

Palestina, ini penting untuk membuka

babak baru mewujudkan kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan rakyat Palestina", pungkas Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.

Foto : Gilang





كتلة حزب العدالة والرفاهية التابعة لمجلس النواب الاندونيسي
يقدر الدبلوماسية الإندونيسية بنجاح يحث مجلس الأمن الدولي

على تأكيد الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين



وخلص جزولي إلى أن "السياسة الخارجية لإندونيسيا هي بشكل واضح وثابت على الجانب الفلسطيني. نحن ندعم كاملا جهود الاستقلال الفلسطيني ، ونحث العالم على حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الوحشية الإسرائيلية".

الدكتور جزولي جويني

رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية في مجلس النواب الاندونيسي

في حث مجلس الأمن الدولي على التحدث بتفويض كامل لتأكيد الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين. هذه خطوة سياسية مهمة للحفاظ على روح القانون الدولي من قبل الدول. هكذا شرح جزولي في بيان مكتوب.

اصر إندونيسيا عقب البيان الأمريكي الأخير الذي لا يعتبر أي انتهاكات لقانون الاستيطان الإسرائيلي الدولي في فلسطين. كتلة حزب العدالة والرفاهية ترد رد فعل قوي على موقف الولايات المتحدة كموقف حزين وسوء سيء للسلام العالمي.

وقال عضو اللجنة الأولى لمجلس النواب الاندونيسي "من الواضح أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي شكل من أشكال الاحتلال أو ضم الأراضي الفلسطينية وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ترفض إندونيسيا بشدة لأن هذا شكل من أشكال الاستعمار في العصر الحديث الذي لا يزال قائما".

يدعم فصيل حزب العدالة والرفاهية

جاكرتا (٢١/١١) - أعرب رئيس كتلة حزب العدالة والرفاهية التابعة لمجلس النواب الاندونيسي جزولي جويني عن تقديره لدبلوماسية إندونيسيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي نجح في حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير قانونية.

وقال "نقدر دبلوماسيتنا في الأمم المتحدة برئاسة السفير ديان تريانسياه ديان الذي نجح أخيرا في

ورد من خلال بيان مكتوب الممثل الدائم الإندونيسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك ديان تريانسياه ديان (٢١/١١) في اجتماع مجلس الأمن الفلسطيني الذي انعقد في نيويورك منذ يوم الأربعاء (٢٠/١١) ، نجحت إندونيسيا أخيرا في حث مجلس الأمن الدولي على تأكيد الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين. هذه هي المرة الأولى بعد فترة طويلة من فشل رئيس مجلس الأمن الدولي للتحدث نيابة عن مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.



الدولي. وخلص جزولي إلى أن "السياسة الخارجية لإندونيسيا هي بشكل واضح وثابت على الجانب الفلسطيني. نحن ندعم كاملا جهود الاستقلال الفلسطيني ، ونحث العالم على حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الوحشية الإسرائيلية".

كاملا الخطوات الدبلوماسية لإندونيسيا لحشد التضامن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ، بما في ذلك من خلال مقاطعة سحب الاستثمارات والعقوبات. تطلب إندونيسيا إجراء تحقيق كامل في تصرفات إسرائيل وتعاقب إسرائيل كنتيجة للانتهاكات المتكررة للقانون

“Saya mengajak seluruh Parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang di dukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat ‘fractured’ solusi damai antar keduanya

**Dr. MARDANI,
ALI SERA, M.Eng.**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (21/11) — Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengapresiasi Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Kiyai Ma'ruf Amin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi yang menolak pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mendukung hak Isreal membangun pemukiman Yahudi di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel kini.

“Saya mengapresiasi Kiyai Ma'ruf dan Ibu Menlu yang menolak pernyataan AS karena mendukung Yahudi Israel yang

Mardani Ajak Parlemen Dunia Peduli Masalah Penjajahan di Palestina

terus membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Kecamatan ini datang tidak dari Indonesia saja tapi Uni Eropa juga,” kata Mardani, Rabu (20/11).

Ketua DPP PKS ini juga sekaligus mengancam sikap AS yang semakin memperkeruh konflik di wilayah timur tengah antara Palestina-Israel.

“Semenjak tahun 2016, Presiden Trump semakin nampak tidak pernah menginginkan penyelesaian konflik Palestina-Israel padahal sudah ada resolusi PBB tentang two state solution yang telah di sepakati,” ujar Mardani.

Legislator asal Dapil Jakarta Timur mengungkapkan sikap Trump itu diperlihatkan jelas ketika tahun 2018 lalu AS dengan sengaja membuka secara resmi kedutaan besar negara AS untuk Israel di Yerusalem (14/5/2018) dan kini malah mendukung Israel terus membangun pemukimannya di wilayah Tepi Barat Palestina.

“AS selalu konsisten untuk tidak konsisten dalam kebijakan luar negerinya, terutama yang terkait masalah konflik timur tengah seperti antara Palestina-Israel padahal jelas melanggar



hukum internasional,” lanjut Mardani.

Mardani mengajak untuk seluruh senator dan parlemen di dunia untuk mengancam sikap AS yang terus meretakkan solusi damai Palestina-Israel yang terus di gagas selama ini.

“Saya mengajak seluruh Parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang di

dukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat ‘fractured’ solusi damai antar keduanya,” pungkasnya.

Hampir 600 ribu warga Israel tinggal di pemukiman Tepi Barat—yang dibangun Israel setelah mengambil alih wilayah itu dalam Perang Enam Hari pada 1967. Kawasan itu juga merupakan rumah bagi hampir 3 juta warga Palestina

yang hidup di bawah kendali pasukan keamanan Israel, menurut Biro Pusat Statistik Otoritas Palestina. Hampir 2 juta lebih warga Palestina tinggal di Gaza—jalur sepanjang 25 mil yang dikelola oleh kelompok militan Hamas dan dikenai blokade Israel-Mesir selama 12 tahun.

Foto . Moehil

Selamat Milad

10th

twitter
@FPKSDPRRI

20 November 2009 - 20 November 2019



Selamat ya telah 10 tahun mengudara memberi warna & pembeda perjuangan parlemen. Semoga Allah bimbing jalan kita untuk membela yang benar, berpihak kepada kepentingan rakyat umat dan kokohnya nasionalisme Indonesia. Amiin



Website
fraksipks.id



Instagram
fraksipksdpri



Twitter
@fraksipksdpri



Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Legislator Minta Kapolri dan Mendagri Kerja Sama Deteksi Dini Terorisme

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Dimiyati Natakusumah meminta Kapolri Jenderal Idham Azis bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Tito Karnavian untuk melakukan deteksi dini terorisme serta mencegah kejahatan lainnya yang kerap terjadi mengancam diberbagai wilayah di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Dimiyati beberapa waktu lalu dalam merespons peristiwa bom bunuh diri yang terjadi belum lama ini di Mapolrestabas Medan.

Pelaku men

gunakan jaket ojek online dan menyusup masuk di tengah kerumunan pemohon SKCK.

Menurut Dimiyati, kerja sama yang dilakukan antara Idham dan Tito akan diteruskan ke jajaran pemerintah daerah (pemda). Nantinya, atas arahan Kemendagri, pemda dapat membuat aturan untuk mewajibkan pemasangan kamera CCTV bagi pihak yang memohonkan izin mendirikan bangunan. "Saya menghimbau Kapolri dan Mendagri untuk kolaborasi membuat memorandum of understanding (MoU). Dan nanti Mendagri tindaklanjuti ke Pemda," kata Dimiyati.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Lebak-Pandeglang ini menilai, keberadaan kamera CCTV di tempat terbuka sangat penting untuk mendeteksi dan merekam peristiwa tindak pidana yang mungkin bisa terjadi. Nantinya, pihak yang memohon izin mendirikan bangunan dapat diwajibkan untuk memasang CCTV di depan bangunan yang didirikannya tersebut. "Kita

Kita meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya

Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H

Anggota Komisi III DPR RI

meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya," katanya.

Dikatakannya, CCTV itu sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi vital untuk dapat melihat kejadian apa saja yang terjadi. "Ini sangat membantu. Kalau polisi yang memasang (CCTV) berapa biayanya. Oleh karena itu bekerja sama. Tiap yang meminta izin wajib pasang CCTV. Nanti command center-nya ada di kecamatan dan dipadukan dengan kepolisian,"

ujar mantan Bupati Pandeglang dua periode ini.

Ia menambahkan, kolaborasi konstruktif antara Polri, Kemendagri, dan Pemda ini sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik terorisme ataupun lainnya



Tentunya akhir-akhir ini publik menghubungkan dengan kasus puisi konde beberapa waktu yang lalu juga SP3 gitu. Hal ini semakin menguatkan terhadap orang-orang yang untouchable, tidak bisa tersentuh pak. Nah ini saya pikir harus jadi perhatian

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI, SE

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyinggung soal ramainya isu penistaan agama di Indonesia. Habib Aboe Bakar menyayangkan penegakan hukum yang seolah kurang tegas terkait kasus penistaan agama.

Hal itu disampaikan Aboe Bakar saat sesi tanya jawab dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Habib Aboe Bakar mulanya mengaku kerap 'panas' ketika

Tegas! Politisi PKS Ke Kapolri: Yang Hina Presiden Diciduk, Hina Rasul Kok Diem?

ditanya masyarakat perihal penegakan hukum dalam kasus penistaan agama yang tak berimbang.

"Akhir-akhir ini kembali disibukkan dengan isu penistaan agama. Saya sebagai anggota Komisi III saya kerap panas kalau ditanya konstituen pak, bapak (Kapolri) bisa tanya Pak Yazid (Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani) bagaimana perasaannya di Kalsel kalau begitu ditanya tentang penghinaan Rasulullah itu," kata Aboe Bakar.

Habib Aboe Bakar menjelaskan seringnya adanya ketimpangan dalam penanganan kasus penistaan agama. Padahal, kata dia, untuk kasus penghinaan presiden, polisi langsung bergerak cepat.

"Sementara kalau kita menghina presiden aja udah diciduk pak, ciduk udah enggak ada urusan ngina presiden itu, tapi ngina Rasulullah kok diem gitu pak. Buat kami warga Kalsel jika ada yang menghina nabi pak, wah marah kita pak pasti," ujarnya.

Politikus PKS itu tak menjelaskan kasus yang

dimaksudnya. Namun, dia mengatakan kasus tersebut berkaitan dengan kasus puisi yang sebelumnya telah di-SP3 oleh polisi.

"Tentunya akhir-akhir ini publik menghubungkan dengan kasus puisi konde beberapa waktu yang lalu juga SP3 gitu. Hal ini semakin menguatkan terhadap orang-orang yang untouchable, tidak bisa tersentuh pak. Nah ini saya pikir harus jadi perhatian," tegas Habib Aboe Bakar.

Habib Aboe Bakar bahkan secara terang-terangan menyebut beberapa nama yang kasusnya seolah tak ada tindak lanjut. Misalnya, kata dia, kasus penistaan agama oleh Ade Armando.

"Ada beberapa nama yang sudah dilaporkan berkali kali ada nama Permadi, Ade Armando enggak selesai-selesai tuh kelanjutannya gimana," ungkap dia.

Foto : Ribud



PKS: Pemasukan Negara dari Sektor Kelautan Memprihatinkan

Pemasukan negara dari laut menyedihkan. Kita perlu banyak belajar ke negara-negara yang berhasil dalam mengelola lautnya”

Dr. HERMANTO, SE., MM

Anggota BANGGAR DPR RI

Jakarta (20/11) — Anggota Badan Anggaran DPR dari FPKS Hermanto menyebutkan luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Namun menurutnya, sejauh ini pemasukan negara dari pengelolaan laut jauh tidak sebanding dengan luasnya tersebut.

“Pemasukan negara dari laut menyedihkan. Kita perlu banyak belajar ke negara-negara yang berhasil dalam mengelola lautnya”, papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (20/11).

Diungkapkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan dan kelautan tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 900 miliar dan penerimaan pajaknya

ditargetkan Rp. 2 triliun.

“Jadi total target penerimaan negara tahun 2020 dari sektor kelautan dan perikanan hanya Rp. 2,9 triliun”, ucap legislator yang juga anggota Komisi 4 DPR ini.

Sebagai perbandingan, lanjutnya, PNBP sektor Kehutanan tahun 2020 ditargetkan Rp 4,73 triliun.

“Jadi dibandingkan dengan PNBP Kehutanan saja, penerimaan total sektor kelautan dan perikanan masih kalah”, keluhnya.

Lebih jauh, Hermanto yakin bahwa jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah tahu penyebab dari masih rendahnya penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Dugaan penyebabnya antara lain: banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya, markdown (ukuran kapal yang didaftarkan jauh lebih kecil dari sesungguhnya), LKU (Laporan Kegiatan Usaha) dan LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan) sering tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

“Kalau sudah tahu penyebabnya, saya juga yakin KKP tahu cara mengatasinya”, ujarnya.

Menurutnya, indikator kesungguhan dan keberhasilan KKP mengatasi berbagai masalah tersebut adalah penerimaan negara.

“Kalau realisasi penerimaan negara hanya Rp. 2,9 triliun, meski mencapai target, namun belum bisa dikatakan sungguh-sungguh. Penerimaan tersebut masih jauh dari potensi laut yang mencakup 2/3 wilayah NKRI”, papar Hermanto.

“Realisasinya harus lebih besar dari itu. Setidaknya sama dengan PNBP sektor kehutanan, Rp. 4,74 triliun”, pungkas legislator dari dapil Sumatera Barat 1 ini.

Foto : Dpr.go.id
Background. Istimewa



Kami yakin, dukungan kepada DPR akan terus semakin besar untuk melanjutkan revisi undang-undang ini. Tinggal kita memperkuat dan meningkatkan kualitas konten RUU revisinya, dan rakyat akan bersama dengan DPR

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP.,MM
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (15/11) – Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, sangat kecewa dengan keputusan pemerintah menghentikan revisi undang-undang No. 5 Tahun 1990.

Menurut Akmal, pada periode pemerintahan yang baru ini, memutuskan tidak akan memasukkan revisi UU No.5 Tahun 1990 dalam prolegnas.

"Penghentian pembahasan RUU ini terjadi sejak Menteri LHK menyampai surat kepada Ketua DPR RI dengan surat Nomor S.343/MenLHK/Setjen /Kum.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal penyelesaian Rancangan Undang Undang

KOMISI IV

Fraksi.pks.id | Ahad 17 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



DPR Akan Tetap Dorong Revisi Undang-Undang No.5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang intinya: Mengajukan permohonan untuk kiranya tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang KSDAHE", ujarnya.

Akmal berkata Presiden RI yang diwakili oleh otoritas terkait dengan konservasi sumberdaya alam yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah memberikan pandangan bahwa UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak perlu direvisi. Bahkan lebih lanjut lagi, pemerintah telah menyurati ketua DPR RI untuk tidak memasukkan revisi UU 5 tahun 1990 ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024.

"Saya menyatakan pendapat, bahwa sikap pemerintah menolak revisi UU yang mengatur perihal konservasi ini, tidak dapat diterima akal sehat. Undang-undang ini menjadi garda depan dalam perlindungan kawasan konservasi dan ekosistemnya. Undang-undang ini telah berjalan sekitar 30 tahun, maka sudah sepatutnya Undang-undang ini perlu untuk direvisi dengan pertimbangan, banyak

perubahan terhadap ekosistem kita sehingga pembaharuan aturan atau payung hukum perlu juga di selaraskan dengan mempertimbangkan paradigma pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis masyarakat", urai Akmal.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan ini menambahkan beberapa catatan pentingnya revisi atas Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Ia mencontohkan beberapa kejadian seperti berulang kali kita mendengar akan perburuan dan penyelundupan satwa. Keseimbangan ekosistem yang mengganggu dan mengancam punahnya berbagai satwa endemik Indonesia. Dengan berbagai kasus kejahatan konservasi sumber daya alam ini, negara telah dirugikan puluhan triliun. Sementara itu, lanjut dia, pidana yang mengatur hukum terhadap pelaku kejahatan konservasi hanya berupa penjara 1-10 tahun atau denda Rp. 50-200 juta. Ketentuan tersebut sangat rendah, dibandingkan risiko yang akan dihadapi oleh generasi anak cucu kita dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Konstitusi UU

1945 pasal 21 disebutkan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Oleh karena itu, Anggota Dewan yang telah lama duduk di komisi yang membidangi komisi IV DPR RI menyatakan akan tetap mengusulkan revisi UU 5 tahun 1990.

"Kami akan tetap mendorong agar UU 5 tahun 1990, tetap dilakukan revisi dan hak ini dilindungi serta diamankan konstitusi. Undang-undang ini juga merupakan amanah masyarakat luas, sebagai mana petisi revisi UU 5 tahun 1990 yang telah ditandatangani lebih dari 320 ribu orang melal ui

laman change.org. Kami yakin, dukungan kepada DPR akan terus semakin besar untuk melanjutkan revisi undang-undang ini. Tinggal kita memperkuat dan meningkatkan kualitas konten RUU revisinya, dan rakyat akan bersama dengan DPR" pungkas Andi Akmal Pasluddin.



"Lancarnya musim tanam kali ini, akan berpengaruh kebijakan pemerintah untuk menekan Impor. Memang ini bukan satu-satunya faktor. Tapi salah satu yang menentukan,

H. JOHAN ROSIHAN, ST
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (18/11) — Anggota DPR komisi IV, Johan Rosihan meminta pemerintah untuk mempersiapkan ketersediaan pupuk dan bibit terjamin menjelang musim tanam tahun 2019 - 2020.

Menurut Johan Pupuk dan Bibit ini sangat penting tersedia pada sentra-sentra produksi padi agar proses tanam yang sudah dimulai bulan november 2019 ini, tidak ada kendala pendukung utamanya selain ketersediaan lahannya.

"Lancarnya musim tanam kali ini, akan berpengaruh kebijakan pemerintah untuk menekan Impor. Memang ini bukan satu-satunya faktor. Tapi salah satu yang menentukan, akan ketersediaan hasil produksi dalam negeri yang berdampak pada stok beras nasional sehingga akan menjadi jalan untuk mengurangi impor pangan", ucap Johan.

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, untuk memberi fokus lebih kepada

KOMISI IV

Fraksi.pks.id | Senin 18 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Tahun Depan, Pemerintah Harus Batasi Impor Beras!

persiapan tanam, agar pupuk dan bibit tersedia ketika dibutuhkan. ketepatan waktu, ketepatan guna dan ketepatan sasaran tersedianya pupuk dan bibit menjadi sangat penting pada keberhasilan awal pada musim tanam.

"Saat ini, Permasalahan terkait kebijakan pupuk subsidi diantaranya sistem penetapan alokasi pupuk dan data akurasi petani. Sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan ketentuan (moral hazard), penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis anjuran, HET yang berlaku kurang realistis, keterbatasan anggaran belanja pemerintah, sistem distribusi tertutup yang belum optimal dan masih lemahnya pengawasan di lapangan", terangnya.

Johan menambahkan, ketika stok beras nasional cukup dari dalam negeri, maka tidak ada alasan pemerintah untuk membuka kran impor beras medium untuk memenuhi gudang-gudang bulog. Pemerintah hanya perlu memberikan izin impor beras premium seperti basmati yang kebutuhannya tidak banyak dan bukan konsumsi pokok mayoritas masyarakat Indonesia.

Legislator asal Sumbawa

ini mengatakan, produksi pangan terutama beras tahun 2020, selain dipengaruhi oleh bibit dan pupuk, juga akan dipengaruhi oleh curah hujan dimana pada musim tanam tahun ini mundur akibat panjangnya musim kemarau.

"Pola tanam antara palawija dan padi secara bergantian akan berdampak pada keserempakan musim tanam, karena sebagian ada yang tetap menanam padi dengan mengandalkan irigasi, ada yang mendahulukan penanaman palawija", tutur Johan.

Politisi PKS ini menerangkan, bahwa kebutuhan beras nasional tahun 2020 agar impor dapat berkurang adalah memenuhi jumlah 35 juta ton beras.

"Selama ini kisanan konsumsi beras nasional sebesar 33,47 ton sampai dengan 34 juta ton beras. Sedangkan produksi beras hampir selalu dikatakan surplus. Sebagai contoh tahun 2018, target yang optimis produksi gabah sebesar 80 juta ton atau setara dengan 46,5 juta ton beras. Terjadi surplus 13,03 juta ton beras dari jumlah konsumsi nasional. Tapi tetap terjadi impor beras yang

banyak membuat keheranan banyak pihak," jelas Johan.

Pada tahun 2019, lanjut Johan, produksi beras diprediksi meningkat 1% hingga 2% dibandingkan tahun 2018. BPS memprediksi produksi beras nasional tahun 2018 akan mencapai 32,4 juta ton. Artinya, ada kenaikan 500.000 ton hingga 1 juta ton produksi beras di tahun 2019. Pada kenyataannya, 2019 sangat hampir setiap musim panen gaduh secara nasional akibat impor beras.

Fraksi PKS, tambah Johan, akan mendesak pemerintah untuk memperbaiki aspek teknis, manajemen dan regulasi penyaluran pupuk subsidi dan ketersediaan bibit unggul yang merata sehingga memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, tepat lokasi dan tepat sasaran. Upaya ini akan diperlukan demi suksesnya masa tanam yang dibuktikan dengan suksesnya pada masa panen raya.

"Saya berharap, dengan adanya penggunaan data tunggal yang direncanakan anak

an kementerian pertanian, tidak ada lagi kebijakan impor beras yang signifikan besarnya sehingga membuat gaduh secara nasional. Ini tentunya perlu didukung oleh perencanaan awal yang dimulai pada musim tanam kali ini, dan persiapan pengendalian akibat situasi curah hujan mendatang. Bibit yang baik, ketersediaan pupuk yang merata pada sentra padi, akan berpengaruh besar pada suksesnya musim panen raya. Semoga pemerintah komitmen, produksi beras cukup, maka impor berkurang drastis", tutup Johan Rosihan.



“Kami meminta kementerian pertanian, dimasa yang akan datang agar mengefektifkan program asuransi pertanian dengan menyediakan berbagai fasilitas kemudahan menjadi peserta asuransi pertanian

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (18/11) — Anggota komisi IV DPR, Slamet mengatakan evaluasi asuransi pertanian pada tahun 2019 belum efektif, sehingga pada kejadian puso tahun ini para petani sangat terpuruk karena tidak ada backup untuk melanjutkan usaha tani berikutnya.

Asuransi pertanian merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP). Berdasarkan UU tersebut, asuransi pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

Legislator PKS ini menerangkan, bahwa puso

KOMISI IV

Fraksi.pks.id | Senin 18 November 2019

Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Asuransi Pertanian Belum Efektif, Pemerintah Perlu Hadir Lebih Intensif

tahun 2019, akibat musim kemarau yang panjang, memicu kegagalan area panen seluas 86.866 Ha per 18 Oktober 2019. Areal pertanian gagal panen tahun 2019 ini lebih luas dibanding tahun 2018 yang seluas 33.162 ha akibat dampak kekeringan pada area 185.162 ha.

Asuransi pertanian, lanjut dia, merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP). Berdasarkan UU tersebut, asuransi pertanian mampu memberikan efek penyangga bagi petani agar tetap mampu berusaha di masa yang akan datang karena asuransi ini mampu meningkatkan kemampuan petani dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

“Kami meminta kementerian pertanian, dimasa yang akan datang agar mengefektifkan program asuransi pertanian dengan menyediakan berbagai fasilitas kemudahan menjadi peserta asuransi pertanian. Program asuransi pertanian membutuhkan pembiayaan yang memadai, baik dari sumber APBN maupun APBD, program perbankan, kemitraan

dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat. Namun bila pemerintah tidak hadir, maka upaya asuransi pertanian hanyalah sia-sia belaka”, ucap Slamet.

Politisi dari daerah pemilihan Sukabumi ini menerangkan, pada tahun 2019, Kementan mematok target produksi padi tahun 2019 sebesar 83 juta ton gabah kering giling (GKG). Akan tetapi, Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Kerangka Sampel Area (KSA) meramalkan produksi padi jauh lebih rendah yakni hanya 56,9 juta ton GKG. Dengan adanya puso, target-target tersebut agak meleset akibat puso yang cukup lebar. Sawah yang mengalami puso, petani sudah mendaftar asuransi tapi tidak mendapatkan klaim sehingga mendapat penggantian Rp 6 juta per ha. Sedangkan yang tidak mengikat akan mendapatkan bantuan benih. Namun sejauh mana jangkauan asuransi tani ini, masih belum merata menjangkau para petani

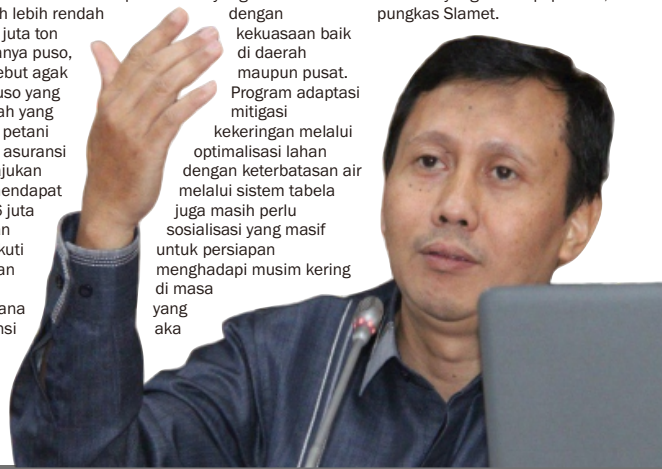
yang gagal panen.

Di sisi lain, kata Slamet, upaya Kementan dalam menyiapkan sumur suntik, pompa, traktor roda 4, traktor roda 2, selang pipa dan normalisasi saluran yang tergabung pada program bantuan kepada petani perlu evaluasi dari sebaran dan efektifitasnya. Masih banyak para petani yang belum mendapatkan program bantuan karena yang saat ini mendapat program tersebut hanya para petani yang memiliki akses

dengan kekuasaan baik di daerah maupun pusat. Program adaptasi mitigasi kekeringan melalui optimalisasi lahan dengan keterbatasan air melalui sistem tabel juga masih perlu sosialisasi yang masif untuk persiapan menghadapi musim kering di masa yang akan

datang.

“Saya menekankan kembali kepada pemerintah, untuk hadir lebih intensif pada penerapan asuransi pertanian untuk menjamin keberlangsungan realisasi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP). Catatan kami, realisasi AUTP baru tercapai 52% (519.306 Ha) dari target 1.000.000 Ha. Pemerintah AUTP merupakan andil pemerintah sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap masalah yang dihadapi petani”, pungkas Slamet.



"Saya berharap, pemerintah mampu mengembangkan bibit kedelai lokal yang saat ini, hasil produksinya masih terjamin kesehatannya ketika di konsumsi. Sedangkan kedelai rekayasa genetika, masih

berpolemik karena tidak ada jaminan di masa datang

Drs. HAMID NOOR YASIN, MM

Anggota Komisi IV DPR RI



KOMISI IV

Fraksi.pks.id | Senin 18 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



ADANYA REKAYASA GENETIK,

PKS Minta Pemerintah Perketat eleksi Kedelai Impor

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin meminta pemerintah agar memperketat seleksi kedelai impor yang terindikasi berbahaya bagi kesehatan akibat adanya rekayasa genetika pada tanaman kedelai yang di produksi dari luar.

Menurut Hamid Negara-negara maju sentra kedelai, saat ini menggunakan bibit kedelai yang telah dimodifikasi secara genetik (GMO/Genetically Modified Organism), sehingga 80% adalah organisme rekayasa yang belum terjamin kesehatannya ketika di konsumsi manusia. Dampak akibat konsumsi produk makanan yang berasal dari rekayasa genetika, akan di ketahui setelah bertahun-tahun konsisten masuk dalam tubuh.

"Solusi paling aman ya tidak Impor kedelai. Kita gunakan produksi lokal yang lebih sehat, lebih enak dan lebih bergizi. Namun untuk saat ini memang belum memungkinkan an karena

produksi kedelai lokal dalam negeri hanya memenuhi 16,4% atau sekitar 4.800 ton dari target 2,8 juta ton kebutuhan kedelai nasional", urai Hamid.

Kami Fraksi PKS, lanjut Hamid, meminta kepada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi kedelai lokal dengan perluasan areal tanam dan mengembangkan benih unggul yang aman bagi kesehatan. Benih unggul ini mesti tepat secara varietasnya, yang cocok dengan lingkungan Iklim Indonesia yang tropis. Selama ini kedelai identik dengan tanaman subtropis, sehingga pemerintah perlu melakukan inovasi dan teknologi benih unggul kedelai untuk daerah tropis. Dengan kesesuaian bibit kedelai dengan iklim di Indonesia, semoga upaya intensifikasi dapat dilakukan secara maksimal.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa bibit kedelai dengan varietas yang tepat, jumlah yang cukup, mutu yang baik, waktu yang sesuai, lokasi yang merata dan harga yang cocok, akan mendorong produksi kedelai secara maksimal.

"Tahun 2019, pemerintah telah menancangkan produksi kedelai 3 juta ton. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah produksi, atau menyediakan. Karena secara logika akan sulit di capai dengan luasan lahan yang tersedia", imbuhnya.

Hingga saat ini, kata Hamid, ketersediaan lahan untuk produksi kedelai hanya sekitar 446 ribu ha sampai dengan 614 ribu ha. Luasan ini secara fluktuatif terjadi naik turun tiap tahun sehingga berimplikasi pada produksi kedelai yang tidak konsisten antara 675 ribu ton sampai dengan 963 ribu ton.

"Pemerintah pernah menancangkan pada tahun 2018 akan memenuhi areal tanam khusus kedelai sebesar 2 juta ton, tapi itu hanya angangan. Sebagai perbandingan, luasan lahan brazil khusus menanam kedelai sebesar 30 juta hektar dengan kapasitas produksi sebesar 117 juta ton mengalahkan Amerika yang produksi kedelainya 116,48 juta ton", tuturnya.

Legislasi dari Jawa Tengah IV ini menguraikan, artinya perlu sekitar tiga kali

lipat areal lahan dengan metode ekstensifikasi untuk memenuhi target 3 juta ton kedelai, dan ini agak mustahil untuk saat ini, karena lahan yang tersedia berebut dengan komoditas lain. Sedangkan optimalisasi lahan kritis dan penyesuaian kembali lahan rusak belum dapat terpenuhi. Sedangkan dengan metode intensifikasi, teknologi benih nasional kita masih sangat kurang sehingga saat ini produksi kedelai kita hanya sekitar 2 ton/hektar dengan menggunakan bibit lokal yang aman hasilnya ketika di konsumsi.

"Saya berharap, pemerintah mampu mengembangkan bibit kedelai lokal yang saat ini, hasil produksinya masih terjamin kesehatannya ketika di konsumsi. Sedangkan kedelai rekayasa genetika, masih berpolemik karena tidak ada jaminan di masa datang, orang yang mengkonsumsinya produk ini apakah sehat atau malah terjadi kelainan yang memicu berbagai penyakit baru dalam tubuh", pungkas Hamid Noor Yasin.

Foto : dpr.go.id

DPR: Dibanding Tol, Jalan Umum Harus Jadi Prioritas!

Jakarta (16/11) — Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengkritik ambisi Presiden Jokowi yang akan membangun 5000 km jalan tol hingga tahun 2024.

Menurut Sigit, penyelenggaraan jalan umum yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, bukan jalan tol.

"Sebaiknya pemerintah tidak terlalu mengejar pembangunan jalan tol. Fokus pemerintah seharusnya pada penyelenggaraan jalan umum, baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten/kota yang kondisinya masih banyak yang rusak. Bahkan target kemandapan jalan nasional dalam RPJMN 2014-2019 saja tidak tercapai," kata Sigit.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mengatakan dari target kemandapan jalan 98% dalam RPJMN 2014-2019, pemerintah hanya bisa memenuhi 92%. Bahkan disjumlah provinsi seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua Barat kemandapan jalan nasionalnya hanya bnerkisar diangka 76-78% jauh dibawah target nasional.

Dan yang lebih mempriha-

tinkan, kata Sigit, kondisi kemandapan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang pada tahun 2017 baru mencapai 67.7% untuk jalan provinsi dan 57.3% untuk jalan kabupaten. Sementara target di tahun 2019 kemandapan jalan provinsi sebesar 75% dan jalan kabupaten/kota 65%.

Lihat kondisi jalan umum kita masih banyak yang rusak. Bahkan target RPJMN saja tidak terpenuhi", papar Sigit.

Seharusnya Kata Sigit, yang jadi prioritas bukan membangun jalan tol sampai 5000 km. Jalan tol hanya akan menambah beban masyarakat dan meningkatkan biaya logistik karena merupakan jalan berbayar yang tiap 2 tahun sekali tarifnya naik.

"Sesuai UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik untuk penyediaan dan memeliharanya. Bahkan, jika terjadi kecelakaan yang disebabkan karena kondisi jalan rusak pemerintah bisa dituntut karena masyarakat sudah membayar pajak untuk bisa mendapatkan pelayanan

dasar", tuturnya.

Hingga saat ini, Sigit mengatakan pemerintah sudah membangun 1.500 jalan tol selama lima tahun terakhir. Berbeda dengan jalan tol yang dikebut dan melampaui target RPJMN 2014-2019, target kemandapan jalan nasional justru tidak tercapai.

Foto
Gilang

"Sebaiknya pemerintah tidak terlalu mengejar pembangunan jalan tol. Fokus pemerintah seharusnya pada penyelenggaraan jalan umum, baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten/kota yang kondisinya masih banyak yang rusak. Bahkan target kemandapan jalan nasional dalam RPJMN 2014-2019 saja tidak tercapai,"

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI





Bahas Ratifikasi Perdagangan, DPR Soroti Diskriminasi Sawit Eropa

Jakarta (18/11) — Komisi VI DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan membahas tiga ratifikasi perjanjian kerjasama Internasional antara lain Perse-
tujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Perse-
tujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA (European Free Trade

Association), ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Senin, 18/11).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar menyoroti tentang Ratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA (European Free Trade Association), terutama keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia.

Chairul menyoroti tindakan diskriminasi terhadap produk sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa selama ini, sehingga menyisakan persoalan yang dihadapi oleh Industri Sawit Indonesia.

"Perjanjian Ekonomi

Indonesia dengan EFTA yang sedang kita bahas saat ini, harus menjawab permasalahan terkait tindakan diskriminasi terhadap produk sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Akibat kebijakan tersebut terjadi penurunan harga sawit di secara menyeluruh di Indonesia. Saya mengusulkan memasukkan perjanjian khusus terkait sektor kelapa sawit di dalam perjanjian tersebut, terutama menghapus tindakan diskriminasi tersebut," ungkap Chairul saat ditemui di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta.

Chairul menambahkan kebijakan diskriminasi terhadap

produk sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa berdampak terhadap harga minyak sawit dalam negeri menjadi tertekan diakibatkan serapan sawit Indonesia di pasar dunia internasional tidak maksimal.

"Akibat kebijakan diskriminasi Uni Eropa tersebut menjadikan harga sawit dalam negeri menjadi turun. Dampak dari harga sawit turun sangat dirasakan oleh para petani dan pelaku industri sawit, Pertanian sawit memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa yang cukup besar, industri sawit juga melibatkan hampir 20 juta pekerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya," jelas Politisi PKS asal Riau ini.

"Di dahil saya (Riau), turunnya harga sawit sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena sebagian perekonomian masyarakat di topang dari pertanian seperti sawit dan karet. Oleh karena itu saya berharap momentum perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-EFTA ini bisa solusi terhadap permasalahan yang di hadapi masyarakat terkait harga sawit,"

ungkap Chairul.

Dalam dokumen yang disampaikan Kementerian Perdagangan terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA, dicantumkan bahwa Indonesia dan EFTA menyetujui Deklarasi bersama terkait kerja sama dan pengembangan kapasitas yang akan mewujudkan kerjasama konkrit dalam beberapa sektor salah satunya sektor kakao dan kelapa sawit.

"Dalam dokumen yang diberikan ke kami terkait IE-CEPA (Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement), di halaman 10 diungkapkan bahwa Indonesia dan EFTA akan mewujudkan kerjasama yang kongrit dan khusus dalam beberapa sektor termasuk didalamnya kakao dan kelapa sawit. Semoga ini bisa menjadi bagian dalam menghapus diskriminasi terhadap produk sawit oleh Uni Eropa, sehingga harga sawit bisa kembali normal seperti sebelumnya yang dampaknya bisa menaikkan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di Riau sebagai produsen sawit terbesar di Indonesia," tutup Chairul.

Di dahil saya (Riau), turunnya harga sawit sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena sebagian perekonomian masyarakat di topang dari pertanian seperti sawit dan karet

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi VI DPR RI



Anak-anak ini kan jadi trauma, rumahnya dibakar kemudian bapak ibu mereka dipanah, bahkan mereka eksodus. Harusnya selain ada penanggulangan terkait dengan dampak dari terorisme juga ada dampak dari separatisme

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA

Anggota Komisi VIII DPR RI

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mempertanyakan tidak adanya program sosial kepada anak-anak korban separatisme dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal tersebut langsung disampaikan oleh Hidayat kepada Mensos, Juliari Batubara, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Hidayat mengapresiasi langkah Kemensos yang bakal

PKS Pertanyakan Tidak Adanya Program Sosial untuk Anak Korban Separatisme

melakukan program pendampingan bagi anak korban terorisme. Namun, dirinya meminta anak-anak korban separatisme juga mendapatkan bantuan.

"Banyak anak-anak yang jadi korban kekerasan yang dilakukan kelompok separatis. Kenapa tidak ada program untuk penanggulangan dampak dari separatisme," ujar Hidayat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Hidayat, banyak anak-anak yang menjadi korban serangan kelompok separatis di Papua. Hidayat menyebut akibat serangan tersebut, anak-anak menjadi trauma.

Baginya, penanganan dampak bagi korban separatisme sangat penting untuk dijadikan program oleh Kemensos.

"Anak-anak ini kan jadi trauma, rumahnya dibakar kemudian bapak ibu mereka dipanah, bahkan mereka

eksodus. Harusnya selain ada penanggulangan terkait dengan dampak dari terorisme juga ada dampak dari separatisme," tutur Hidayat.

Seperti diketahui, raker ini membahas evaluasi program dan anggaran Kemensos tahun 2019 serta rencana program tahun 2020. Selain itu, dibahas pula tentang kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana.



RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) KOMISI IX DENGAN BPOM

fraksi.pks.id | Selasa 19 November 2019 | Image Istimewa



H. ANSORYSIREGAR, Lc
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



Kejahatan Besar

Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. untuk itu wahai BPOM lawanlah pelaku-pelaku kejahatan dalam obat dan Makanan ini,yang membunuh masyarakat dan lebih khusus anak-anak secara pelan-pelan.

Investasi BPJS Ketenagakerjaan Rp 416 T, PKS: Siapa Mendapat Manfaat?

Jakarta (19/11) — Di tengah riuh penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terungkap fakta mengejutkan. BPJS Kesehatan diketahui saat ini mengalami defisit mencapai sekitar Rp 32 Triliun dan memiliki hutang atas klaim yang jatuh tempo sekitar Rp 21 Triliun. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan justru memiliki lonjakan dana investasi mencapai Rp 416,78 Triliun.

Fakta itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), Senin (18/11/2019).

Terhitung sejak Desember 2014, realisasi jumlah dana investasi yang dikelola BPJS TK tumbuh dua kali lebih besar. Dari Rp 189,96 Triliun menjadi Rp 416,78 Triliun.

"Sayangnya, dana investasi BPJS TK ini tidak dapat disentuh sama sekali untuk membantu menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit memprihatinkan," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati.

Mufida menyayangkan juga, investasi yang tumbuh

pesat tersebut belum bisa dirasakan secara optimal manfaatnya oleh para peserta BPJS TK. Belum pula ada manfaat yang lebih signifikan bagi pekerja rentan dan PBI yang masih terkendala menjadi peserta BPJS.

"Lagi-lagi, banyak rakyat kecil menjerit karena tidak bisa merasakan manfaat program Jaminan Sosial sebagaimana amanah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004," tegas Mufida.

Tak hanya pekerja rentan, lanjut Mufida, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga masih sangat sedikit yang bisa merasakan manfaat Jaminan Sosial BPJS TK. Baru 533.947 yang terdaftar sebagai peserta BPJS, dari 3 juta lebih PMI di Luar Negeri.

"Padahal, para PMI mempunyai resiko kerja yang lebih berat. Mereka sering disebut Pahlawan Devisa, tapi perlindungan terhadap mereka melalui Jaminan Sosial masih amat rendah," tandas Mufida.

Mufida berharap, semua pihak terkait dalam pemerintah harus segera bisa mendorong peningkatan manfaat jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. BPJS

"Sayangnya, dana investasi BPJS TK ini tidak dapat disentuh sama sekali untuk membantu menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit memprihatinkan,

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

TK perlu didorong lebih memperhatikan pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial lebih baik lagi.

"Kita juga meminta adanya transparansi tentang pengelolaan dana investasi BPJS TK agar manfaatnya bisa lebih terasa bagi para peserta dan melakukan terobosan untuk perlindungan terhadap pekerja rentan di Indonesia," pungkas Mufida.



DISKUSI PUBLIK
Dalam Rangka Hari Guru Nasional

Derita Guru

dalam Sistem
Pendidikan Indonesia

HADIRILAH

Selasa

26 November 2019
Pk. 08.30 - 13.00 WIB

Ruang KK 2
Gedung Nusantara I
Kompleks DPR RI Senayan Jakarta

Konfirmasi kehadiran:
+62 818-0392-4885 | Rif'ah
<http://bit.ly/fgdHariGuru>

Facebook Live
Fraksi PKS DPR RI

f LIVE

KEYNOTE SPEAKER

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D
Presiden PKS

PEMBICARA

Nadiem Makarim, MBA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim
Ketua Umum PP PERGURU

Dr. H. Fahmy Alaydroes, MM., M.Ed.
Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI

Rocky Gerung
Pengamat Pendidikan

MODERATOR

Dr. Ali Chudori, M. Pd.
Departemen Pendidikan DPP PKS

"Penguatan sistem pendidikan vokasi sebagai salah satu jalan peningkatan mutu SDM harus dibenahi sejak hulu ke hilir

**Hj. LEDIA HANIFA A,
S.Si.,M.Psi.T**
Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (21/11) — Pertumbuhan SDM Unggul melalui penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus rencana kerja pemerintahan Jokowi-Maruf, sebagaimana disampaikan dalam penyampaian Nanta Keuangan dan Rancangan APBN kepada DPR RI, 16 Agustus lalu.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan Pemerintah untuk secara mendalam membenahi sistem pendidikan vokasi di negeri ini.

Sebagai pengingat awal, urai anggota Panja Pendidikan Vokasi ini pula, angka pengangguran terbesar di negeri ini dihasilkan oleh para lulusan sekolah setingkat SMK yaitu 11,24% dibanding lulusan SMA yang hanya 7,9%. Padahal jumlah lulusan SMK setiap tahun hanya sekitar separuh dari lulusan SMA, dimana lulusan SMK ada 1,4 juta dibanding lulusan SMA yang berjumlah 2,1 juta.

Ketimpangan ini bisa jadi menunjukkan belum adanya link and match yang terencana,

KOMISI X

Fraksi.pks.id | Kamis 21 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

t @fpksdprri

fraksi.pks.id



BANYAKNYA LULUSAN SMK MENGANGGUR

Sistem Pendidikan Vokasi Perlu Pembenhahan Serius

terstruktur dan terimplementasi optimal antara dunia teori dan kerja di dalam sistem pendidikan vokasi sejak SMK. Akibatnya pasar kerja pun belum melirik lulusan SMK secara maksimal.

"Penguatan sistem pendidikan vokasi sebagai salah satu jalan peningkatan mutu SDM harus dibenahi sejak hulu ke hilir," imbuhnya.

Ledia menambahkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana latihan kerja yang disediakan di sekolah-sekolah vokasi harus mengikuti perkembangan dunia usaha. Penyediaan sarpras ini bisa saja disediakan oleh pemerintah atau dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

"Beberapa kali saya mendatangi sekolah-sekolah vokasi, ternyata sarprasnya, alat-alat yang mereka miliki untuk praktek, ternyata sudah berumur, tidak up to date bahkan ada yang tidak begitu berkesesuaian dengan kebutuhan di lapangan kerja," kata Ledia.

Kedua mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

untuk sekolah sistem vokasi haruslah diarahkan pada hal-hal yang akan mendukung kebutuhan link and match dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

"Dari sekian juta anggaran yang diterima harus benar-benar diutamakan segala pengeluaran yang bisa berkaitan langsung dengan tujuan pengembangan kebutuhan link and match dunia sekolah dengan DUDI ini, apakah itu terkait pemutakhiran bahan ajar, alat peraga, atau peningkatan kapasitas guru," pungkasnya.

Ketiga, pelatihan bagi guru-guru sekolah vokasi harus ditingkatkan. "Memberikan peningkatan wawasan keilmuan dan perkembangan terkini terkait dunia pendidikan dan industri adalah salah satu hal pokok yang perlu diberikan pada guru-guru sekolah vokasi. Sebab merekalah yang akan menjadi penyampai pesan pada peserta didik, sehingga wawasan keilmuan dan keahliannya selayaknya selalu up to date," tutur Ledia.

Keempat, kesempatan bagi para peserta didik di sekolah-sekolah vokasi untuk

magang di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) harus diperbanyak dan diperluas.

Sebab sistem pendidikan vokasi menitikberatkan praktek lapangan lebih besar bobotnya daripada teori kelas. Karena itu maka kesempatan magang bagi para peserta didik harus diperbanyak dan diperluas agar ilmu yang mereka dapat terlatih langsung di lapangan bahkan bisa mendapatkan ilmu baru dari pelatihan kerja yang mereka miliki.

"Sekarang memang sudah ada pemagangan ini dilakukan oleh sekolah-sekolah, tetapi yang kita temui belum banyak dan masih terbatas, belum meluas. Kalau mereka punya satu dua mitra, dari tahun ke tahun ya itu-itu saja tetapnya," kata Ledia.

Karenanya, sambung Sekretaris Fraksi PKS ini lebih lanjut, implementasi program ini tentu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pihak

sekolah, dunia usaha dan kementerian/lembaga di berbagai bidang.

Sekolah perlu membuka jaringan dengan lebih banyak mitra dunia usaha untuk dititipi siswa, sementara kementerian pendidikan bisa ikut membukakan jalan dengan menggandeng pihak DUDI dan Kementerian/Lembaga lain agar siap menampung para pemangag dari sekolah-sekolah vokasi.

"Dengan menggembrel para siswa sekolah vokasi di dunia usaha dan industri ini diharapkan lulusan sekolah-sekolah vokasi bisa lebih terampil dan siap mengarungi dunia kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini," tutup Ledia.

Foto dpr.go.id



HARI ASPIRASI



Kunjungan dari Yayasan Keluarga Cita Surga

Anggota Fraksi PKS DPR RI Hj. Nevi Zuairina menerima Kunjungan Yayasan Keluarga Cita Surga Serpong Tangsel pada Selasa 19 November 2019 di Kompleks DPR RI Senayan. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.



Kunjungan Persaudaraan Muslimah Kota Depok

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si menerima Kunjungan Organisasi Persaudaraan Muslimah Kota Depok Jabar pada Selasa 19 November 2019 di Kompleks DPR RI Senayan. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.

HARI ASPIRASI



Kunjungan Santri el-Tahfizh Cileungsi Bogor

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Fahmi Alaydroes, MM, M.Ed. Dapil Kabupa-ten Bogor menerima kunjungan dari Santri el Tahfizh Cileungsi Bogor pada Selasa 19 November 2019 di Kompleks DPR RI Senayan. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.



Saya mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk sama-sama memberikan keteladanan dan perlindungan untuk anak-anak Indonesia karena merekalah calon pemimpin bangsa di masa depan.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Anak merupakan bagian dari keluarga yang memiliki makna sangat penting. Kehadirannya dalam keluarga tidak hanya menjadi penguat hubungan orang tua, pelanjut keturunan, dan penyejuk mata hati. Akan tetapi kehadirannya memiliki makna yang lebih penting yaitu investasi bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Dalam hadits, Rasulullah Saw. bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631).

Eksistensi anak di keluarga disebutkan dalam Undang-undang no.52 tahun 2009 yang menyatakan bahwa anak merupakan bagian dari

keluarga. "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya."

Salah satu kebutuhan seorang anak dalam tumbuh kembangnya adalah kebutuhan untuk dicintai. Tindakan memberikan pelukan, memberikan kasih sayang, dan penghargaan adalah kemestian yang harus didapatkan seorang anak. Di antara salah satu wujud penghargaan kepada anak adalah memberikan teladan yang baik. Keteladanan di dapatkan seorang anak, terutama dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Lebih khusus keteladanan yang dibutuhkan berasal dari kedua orang tuanya. Keteladanan yang diberikan orang tua mempengaruhi karakter anak-anak. Jika orang tua memberikan teladan yang baik, anak-anak akan meniru dan tertanamlah karakter yang baik. Dan jika orang tua memberikan contoh buruk, maka anak akan meniru dan tertanamlah karakter yang buruk.

Imam Ghazali menyatakan

bahwa seorang anak terlahir dengan hati yang bersih bagaikan permata, tulus, dan jauh dari setiap ukiran dan gambaran. Ketika tumbuh dan berkembang, ia akan menerima setiap ukiran yang diberikan padanya dan cenderung kepada setiap apa-apa yang ia inginkan. Apabila ia dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan tumbuh di atas kebaikan. Sebaliknya, jika ia tumbuh di atas kejahatan maka ia akan celaka dan binasa.

Bagaimana dengan potret perlakuan yang dialami anak-anak Indonesia hari ini? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Berdasarkan kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Dari catatan pelanggaran hak anak di tahun 2018, KPAI mendapati dua kasus yang berada di urutan teratas yaitu kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

(ABH) menduduki urutan pertama (mencapai 1.434 kasus) dan kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus.

Data yang dirilis KPAI di awal tahun 2019 ini, secara tidak langsung menunjukkan minimnya keteladanan dan perlindungan yang diharapkan hadir dalam dunia anak-anak. Anak-anak yang bermasalah dipastikan mengalami kesulitan merespon konsep pendidikan yang diberikan orang tua jika ia melihat orang tuanya tidak menerapkan konsep yang diarahkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Memaknai hari anak dunia yang jatuh pada hari Rabu, 20 November 2019, Dr. Anis Byarwati anggota DPR-RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengajak segenap masyarakat Indone sia untuk sama-sama

memberikan keteladanan dan perlindungan untuk anak-anak Indonesia karena merekalah calon pemimpin bangsa di masa depan.



“Saya meminta Pemerintah Aceh untuk memperbaiki pelaksanaan penyerapan DOKA ini. Jangan sampai, terjadi seperti tahun 2017 di mana penyerapan DOKA tidak optimal yang hampir Rp 1 triliun menjadi SILPA. Hal ini sangat disayangkan karena akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Aceh beserta jajaran, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (20/11/2019).

H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua BAKN DPR RI

Jakarta (22/11) — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikh, menyoroti peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam merencanakan program Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) hampir Rp 1 triliun pada tahun 2017 yang mengendap di kas

Syaikh Soroti SILPA Pemprov Aceh Sebesar Rp 1 Triliun

daerah.

“Saya meminta Pemerintah Aceh untuk memperbaiki pelaksanaan penyerapan DOKA ini. Jangan sampai, terjadi seperti tahun 2017 di mana penyerapan DOKA tidak optimal yang hampir Rp 1 triliun menjadi SILPA. Hal ini sangat disayangkan karena akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Aceh beserta jajaran, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (20/11/2019).

Syaikh menjelaskan, Provinsi Aceh sendiri telah menerima kurun DOKA sejak tahun 2008. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019 DOKA yang telah dikurirkan berjumlah Rp 73,3 triliun. DOKA digunakan untuk membantu Pemerintah Aceh dalam upaya pembiayaan pembangunan dan pemeriharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan masyarakat Aceh pasca konflik dan bencana.

Menurut politisi Fraksi PKS

ini, realisasi DOKA yang baru dilakukan menjelang akhir tahun dapat menyulitkan dalam penyediaan barang dan jasa. Hal ini terbukti dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu yang sulit dipenuhi.

“Saya melihat inilah ke depan yang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemprov Aceh, sehingga program otonomi khusus ini terencana dengan baik, pelaksanaannya juga sedemikian baik. Insya Allah dana yang besar ini akan mampu kemudian mengefektifkan untuk kaitan peningkatan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan, di samping meningkatkan kesejahteraan, bagi warga masyarakat Aceh,” jelasnya.

DOKA untuk otonomi khusus saat ini mengalami break event, di mana menurut Syaikh, Aceh pada tahun 2000 angka kemiskinan berada di 15 persen, kemudian meningkat hingga 32 persen karena konflik dan bencana alam, dan saat ini kembali di angka 15 persen. Oleh karenanya, ia mengimbau sampai akhir

pendanaan DOKA di tahun 2027 nantinya. Pemprov Aceh harus mampu meningkatkan sesuai dengan perkembangan daerah dan provinsi lainnya.

“Itulah harapan kami, dan kalau misal sampai dengan 2027 masih belum bisa terlaksana, maka Pemerintah Provinsi Aceh perlu membuat skema exit-nya seperti apa.

Agar perkembangan ekonomi di Aceh tidak tertinggal jauh dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tutupnya sembari berharap pembahasan DOKA bagi Aceh perlu dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tentu saja bergantung pada keberlangsungan Aceh di masa mendatang.



Tim Kunker BAKN DPR RI menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh, membahas telaah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2019 terkait Dana Otsus Aceh di Provinsi Aceh, Rabu, 20 November 2019. (Foto : dpr.go.id)



DPR Pertanyakan Upaya Penyelamatan Bank Muammalat

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera Anis Byarwati mempertanyakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap fungsi inter mediasi bank

sebagaimana disampaikan Anis dalam rapat kerja antara komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (18/11/2019).

Dalam rapat yang dipenuhi berbagai pertanyaan dari anggota dewan ini, Anis memberi pengantar pertanyaannya dengan mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia bahwa ekonomi syariah akan menjadi arus baru dalam perekonomian nasional.

Ia juga mengutip pernyataan Wakil Presiden KH. Ma'aruf Amin yang menyampaikan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah disamping akan menjadi arus baru, juga akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Menurut Anis, hal ini sangat menggembira karena terdapat harapan besar pada penerapan ekonomi syariah. Anis menegaskan bahwa kasus Bank Muammalat

sudah terjadi sejak 2015 yang terindikasi dari tingginya rasio kredit macet (non performing loan/NPL). Akan tetapi ia menyayangkan sikap OJK yang tidak membuka kondisi tersebut.

"Dari jejak digital, ketika rapat kerja OJK dengan komisi XI tahun lalu, Bapak menyampaikan tidak ada masalah likuiditas. Bank Muammalat hanya tidak ada tambahan modal untuk ekspansi, masalahnya tidak ada investor yang menyuntik. Tapi ternyata kami lihat masalahnya tidak sesederhana itu," ucapnya.

Sementara itu, pada tahun ini kinerja Bank Muammalat cenderung memburuk akibat perlambatan pembiayaan. Berdasarkan laporan publikasi bank menutup paruh pertama 2019 dengan capaian laba bersih Rp 5,1 miliar atau anjlok 95,1% secara tahunan (year-on-year/yo).

Lebih lanjut Anis menegaskan bahwa Bank Muammalat adalah lokomotif perbankan syariah di Indonesia. Artinya wajah ekonomi syariah Indonesia secara mudah dapat dilihat dari kinerja Bank Muammalat. Mengingat belum

Dari jejak digital, ketika rapat kerja OJK dengan komisi XI tahun lalu, Bapak menyampaikan tidak ada masalah likuiditas. Bank Muammalat hanya tidak ada tambahan modal untuk ekspansi, masalahnya tidak ada investor yang menyuntik. Tapi ternyata kami lihat masalahnya tidak sesederhana itu

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

semua aspek dapat dijalankan dengan menggunakan ekonomi syariah di Indonesia, maka Bank Muammalat menjadi etalase keuangan syariah atau sesuatu yang berwujud nyata di masyarakat.

"Kita semua sudah mengetahui dan tidak bisa menutup mata terhadap problem yang dialami oleh Bank Muammalat Indonesia. Problem itu menjadikan kita semua khawatir dan cemas." paparnya.

Merosotnya kinerja bank pada paruh pertama tahun ini juga ditandai dengan rasio-rasio penting yang memburuk. Rasio NPF yang sebelumnya berhasil

ditekan, kembali melambung. Per Juni 2019, rasio NPF kotor naik dari 1,65% menjadi 5,41%, sedangkan rasio NPF bersih naik dari 0,88% menjadi 4,53%.

Mengakhiri pernyataannya, Anis menginginkan agar OJK dapat menjelaskan 3 pertanyaan darinya yaitu sejauh mana pengawasan yang dilakukan OJK dalam hal penyaluran kredit di Bank Muammalat, sejauh mana pengawasan OJK terhadap SDM di Bank Muammalat, apa hasil audit OJK terhadap Bank Muammalat, serta sejauh mana Bank Muammalat menindaklanjuti hasil audit itu.

Junaidi Auly: Sampai Kapan Neraca Dagang Defisit?

Surplus neraca perdagangan saat ini bisa jadi bukan kare-na perbaikan kinerja ekspor, tetapi lebih kepada penurunan impor yang lebih tinggi dibandingkan dari penurunan ekspor. Kita ingin perbaikan surplus neraca perdagangan oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi

**Ir. H. A. JUNAIDI
AULY, MM**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/11) — Rilis BPS tentang neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Oktober 2019 belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pasalnya, defisit neraca perdagangan masih cukup tinggi mencapai US\$1,78 miliar. Nilai ekspor mencapai US\$139,75 miliar. Sedangkan nilai impor mencapai US\$140,89 miliar. Nilai ekspor turun 7,8% (yoy) pada periode Januari-Oktober 2019; sedangkan nilai impor turun lebih tinggi mencapai 9,94% (yoy).

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan surplus neraca perdagangan saat ini bisa jadi bukan karena perbaikan kinerja ekspor, tetapi lebih kepada penurunan impor yang lebih tinggi dibandingkan dari penurunan ekspor. Kita ingin perbaikan surplus neraca perdagangan didorong oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi.

"Kita sepakat bahwa ekspor memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, aliran cadangan devisa, hingga untuk mendorong investasi. Dapat dikatakan bahwa peranan ekspor terhadap tiga hal

tersebut cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perbaikan fundamental kinerja ekspor menjadi sangat mendesak", tukas Junaidi.

Legislator PKS asal Lampung ini menegaskan kontribusi ekspor terhadap PDB tidak lebih dari 20% saat ini, sehingga peranan ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi masih negatif.

Lebih lanjut menurut Junaidi, akumulasi valas ke domestik semakin menurun karena gejala perang dagang antara AS-China. Pada sisi investasi, penurunan permintaan ekspor menyebabkan kegiatan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor menurun. Sehingga memukul aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan buruknya iklim investasi.

"Kami di DPR berharap pemerintah memiliki strategi-strategi jitu agar neraca perdagangan kita bisa surplus, dimana surplus yang ditopang oleh perbaikan fundamental ekspor," jelas Junaidi

Foto " dpr.go.id / sindo



Defisit Membengkak, PKS Minta Pemerintah Optimal Kelola Anggaran

Jakarta (19/11) — Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyoroti melebarannya realisasi defisit per Oktober 2019.

“Data menunjukkan bahwa defisit per Oktober melebar menjadi Rp 289 Triliun, atau meningkat 22% apabila dibandingkan realisasi defisit tahun sebelumnya” kata Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Ecky mengatakan membengkaknya defisit ini merupakan cerminan belum optimalnya

Pemerintah

ah dalam mengelola anggaran, dan belum adanya skema mitigasi shortfall pendapatan yang cukup jelas.

Politisi dari Dapil Jawa Barat III ini pun meminta kepada Kementerian Keuangan untuk terus mewaspadai berbagai pos penerimaan negara, terutama PNB yang cenderung memiliki volatilitas tinggi.

“Pemerintah saat ini masih belum memiliki desain yang baik untuk mengatasi volatilitas PNB, terutama karena masih bergejolaknya harga minyak global,” tuturnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa Indonesia juga belum bisa memaksimalkan potensi pendapatan perpajakan yang ada. Sehingga yang didapat belum optimal.

“Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya hanya sebesar 5,73 persen, sangat jauh apabila dibandingkan

Membengkaknya defisit ini merupakan cerminan belum optimalnya Pemerintah dalam mengelola anggaran, dan belum adanya skema mitigasi shortfall pendapatan yang cukup jelas.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

n pertumbuhan pada periode 2005-2009 yang mencapai 17,56 persen per tahun,” pungkask Ecky.

Ecky juga meminta kepada Kementerian Keuangan untuk terus mendorong tax ratio yang selama lima tahun terakhir mengalami stagnansi pada level 10-11%.

“Stagnansi tax ratio ini disebabkan oleh masih belum jelasnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dimiliki oleh Pemerintah”, terangnya.

Hal lain yang menjadi catatan Ecky adalah membengkaknya angka defisit hingga akhir tahun.

“Target defisit yang menjadi kesepakatan di APBN 2019 adalah sebesar Rp 296

Triliun atau 1,84 persen PDB, dengan membengkaknya defisit per Oktober, dan masih ada 27% belanja negara hingga akhir tahun, maka realisasi defisit bisa Rp 25-50 Triliun lebih tinggi dari target awal,” tambah Ecky.

Lebih lanjut, menurut Ecky membengkaknya defisit artinya Pemerintah akan menerbitkan utang baru.

“Utang yang terus menumpuk dan tidak dikelola dengan baik justru dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta membuat ekonomi Indonesia rentan akan external shock,” tutup Ecky.





الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Ketua PP Muhammadiyah

Prof. Dr. Bahtiar Effendy

Wafat pada Kamis 21 November 2019

Beliau adalah orang baik yang selalu
berpihak kepada kebaikan. Semoga
Allah menerima kebbaikanya,
mengampuni kekhilafannya.
Amin.

Selamat Jalan Guru Besar



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



“Kita harus mulai membuat program pembangunan terintegrasi. Pembangunan yang ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap kondisi sosial masyarakat di suatu daerah. Semua bisa kita wujudkan jika Pemerintah mau melibatkan berbagai pihak untuk berbagai pandangan

**Dr. H. MULYANTO,
M.Eng**

Anggota BALEG DPR RI

Makassar (18/11) — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR-RI Mulyanto meminta Pemerintah mengevaluasi berbagai aturan yang menghambat masuknya investasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Aturan yang terlalu panjang dan berbelit, menurut Mulyanto, sebaiknya disederhanakan agar investor tertarik menempatkan modal usahanya di daerah-daerah.

BALEG DPR RI

Fraksi.pks.id | Selasa 19 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



DPR Dorong Investasi, Birokrasi Harus Efisien

“Secara prinsip kami melihat ada kesamaan keinginan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan DPR. Kami sama-sama menginginkan regulasi tentang investasi di daerah ini dibuat lebih sederhana sehingga investor dari kalangan manapun mudah menanamkan modal usahanya. Namun kami perlu ingatkan upaya penyederhanaan regulasi investasi jangan sampai mengurangi fungsi pengawasan DPR, serta jangan sampai membawa dampak kurang baik terhadap lingkungan,” kata Mulyanto di sela kunjungan kerja (kunker) ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/11).

DPR saat ini, kata Mulyanto, terbuka untuk komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan manapun yang terkait dengan upaya penyederhanaan regulasi investasi. DPR akan memperhatikan aspirasi masyarakat terkait evaluasi regulasi investasi ini agar menjadi salah satu pembahasan dalam sidang pembahasan Undang-Undang.

“Selama masih menjadi domain DPR kami akan

berusaha menyelesaikan masalah ini secepatnya. Berbagai aspirasi yang kami terima hari ini sangat berharga karena terkait dengan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan investasi. Diharapkan dengan meningkatnya investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Mulyanto.

Untuk itu Mulyanto mendorong Pemerintah lebih aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan kalangan LSM.

Pemerintah, lanjut Mulyanto, perlu juga mendengar masukan dari pegiat lingkungan hidup agar setiap investasi yang ditawarkan tidak membahayakan bagi kelestarian lingkungan hidup.

“Kita harus mulai membuat program pembangunan terintegrasi. Pembangunan yang ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap kondisi sosial masyarakat di suatu daerah. Semua bisa kita wujudkan jika Pemerintah mau melibatkan berbagai pihak untuk berbagai pandangan,” tegas Mulyanto



“Kita akan update kondisi terkini.

Kondisi fasilitas pengungsi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan beberapa pelayanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk kami suarakan ke pemerintah Pusat

SAADIAH ULUPUTTY, ST.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (18/11) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, melakukan kunjungan ke Maluku. Selain Jazuli, Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty dan Anggota Fraksi PKS lainnya, Nasir Djamil juga datang dalam kunjungan tersebut.

Adapun maksud kedatangan rombongan Fraksi PKS itu dalam rangka melihat kondisi pengungsi gempa Maluku yang terjadi sejak 26 September 2019.

“Ketua Fraksi PKS DPR RI tiba di Ambon pukul 11.35 WIT tadi. Beliau Bersama Ibu Saadiah Uluputty dan Pak Nasir Djamil akan meninjau kondisi pengungsi korban gempa,” kata

BERITA FRAKSI PKS

Fraksi.pks.id | Senin 18 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id

TIBA DI AMBON HARI INI

Ketua Fraksi PKS DPR RI Langsung Kunjungi Korban Gempa

Ketua Humas DPW PKS Maluku, La Adelin saat ditemui saat melakukan penjemputan di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Senin (18/11/2019)

Selain meninjau kondisi pengungsi, rombongan juga akan melakukan sejumlah agenda diantaranya meninjau Rumah Sakit dan sekolah darurat, silaturahmi dengan Gubernur Maluku dan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat dan kader PKS.

“Agenda lainnya juga ada yakni meninjau kondisi rumah sakit darurat dan sekolah darurat, silaturahmi dengan Gubernur serta mengisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,” lanjut Adelin.

Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty menyatakan, kunjungan ke lokasi pengungsian dilakukan untuk melihat kondisi terkini masyarakat yang terkena dampak bencana. Dirinya berharap peninjauan sejumlah kawasan terdampak akan menjadi catatan untuk disuarakan ke pusat.

“Kita akan update kondisi terkini. Kondisi fasilitas pengungsi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan beberapa pelayanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk kami suarakan ke pemerintah Pusat,” kata Saadiah.

Srikandi Maluku itu menambahkan, sejumlah bantuan juga telah diserahkan kepada pengungsi. Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI juga sudah mengirim bantuan ke pengungsi gempa Maluku beberapa waktu.

“Kami bawa bantuan dan sudah serahkan kepada pengungsi. Separuh bantuan sudah diserahkan kepada masyarakat lewat partai atau lewat LSM-LSM beberapa waktu lalu juga,” tambahnya.

Gempa tektonik yang menimpa Maluku terjadi ribuan kali. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejak tanggal 26 September hingga 16 November 2019, tercatat telah terjadi 1.345 kali gempa susulan. Kondisi gempa yang masih saja terjadi membuat warga masih trauma.



Gaji Pertama Ketua dan Anggota Fraksi PKS untuk Korban Gempa Maluku

Kami ingin pastikan agar logistik kebutuhan dasar para korban khususnya yang tinggal di tempat-tempat pengungsian terpenuhi. Untuk itu pemerintah harus memiliki data akurat dan respon yang cepat dan tepat dalam mengkoordinir dan mendistribusikan bantuan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Maluku (19/11) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini bersama Anggota Fraksi PKS DPR Saaidah Uluputty (Maluku) dan Nasir Jamil (Aceh) didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdul Aziz, Ketua dan Anggota Fraksi PKS DPRD Maluku mengunjungi sejumlah lokasi terdampak gempa Maluku (Senin, 18/11). Kunjungan Fraksi PKS DPR ini juga didampingi langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku atas perintah Gubernur. Terakhir, rombongan Fraksi PKS juga diterima Gubernur di rumahnya.

Lokasi yang dikunjungi

yaitu tempat pengungsian Puncak Bumbun Neg. Liang Kabupaten Maluku Tengah, sekolah swasta dan negeri darurat (bertemu Kadis Pendidikan dan para kepala sekolah yang sekolahnya roboh), rumah sakit darurat, serta gereja yang digunakan menampung pengungsi.

"Kedatangan Fraksi PKS DPR ke sini mengunjungi bapak, ibu, saudara dan anak-anak untuk menunjukkan empati dan kepedulian kami karena Fraksi PKS cinta kepada warga Maluku yang saat ini terkena musibah dan sebagian masih tinggal di pengungsian," kata Jazuli dalam sambutannya.

Di depan para pengungsi

terdampak gempa Jazuli menyampaikan salam dari Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. "Salam cinta dari Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. H. Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS H.M. Shohibul Iman, Ph.D. Insya Allah PKS akan berusaha membantu masyarakat Maluku semaksimal dan sesuai kewenangan," katanya.

Jazuli Juwaini, Saaidah Uluputty, dan Nasir Jamil atas nama Fraksi PKS DPR RI menyerahkan sejumlah dana/bantuan yang merupakan gaji DPR pertama di periode baru ini untuk membantu para korban dan proses rehabilitasi. Sebelumnya bantuan, baik dana, logistik, maupun tenaga (relawan) juga telah dihimpun dari kader-kader PKS dari Maluku maupun luar daerah Maluku.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak kepada semua elemen bangsa untuk membantu saudara-saudara sebangsa yang terkena musibah di berbagai tempat khususnya di Maluku.

"Gotong royong, kesetiakawanan, dan kerelawanan adalah budaya bangsa kita. Mari tumbuhkan kesadaran saling membantu

saudara sebangsa yang terkena musibah. Dari sana muncul banyak keberkahan, diantaranya semakin kuatnya persatuan dan kesatuan diantara kita," ungkapnya.

Insya Allah Partai Keadilan Sejahtera, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, akan terus berikhtiar merekat keindonesiaan dengan semangat saling peduli dan membantu saudara-saudara yang terkena musibah di mana pun mereka berada.

"Semoga Allah ridho dan jauhkan negeri ini dari marabahaya. Allah ringankan ujian masyarakat yang terkena musibah. Amiin," doanya.

Dorong Respon Cepat dan Tepat Pemerintah

Ketua Fraksi PKS berharap

respon cepat dan tepat Pemerintah dan Pemda dalam melakukan tanggap darurat, menolong masyarakat terdampak serta dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

"Kami ingin pastikan agar logistik kebutuhan dasar para korban khususnya yang tinggal di tempat-tempat pengungsian terpenuhi. Untuk itu pemerintah harus memiliki data akurat dan respon yang cepat dan tepat dalam mengkoordinir dan mendistribusikan bantuan," ungkapnya.

Tahap berikutnya baru rehabilitasi lingkungan dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik termasuk rumah sakit, sekolah, pasar, jalan-jalan dan seterusnya, pungkas Jazuli.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat

Atas anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019 dari Komisi Informasi Pusat. berturut-turut dari tahun 2017. Semoga semakin memberikan semangat bagi PKS untuk menjadi partai yang modern, akuntabel dan dapat diakses oleh semua pihak.



Website
fraksipks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI

“Saya berharap, pemerintah dan DPR mampu menyelesaikan revisi regulasi tentang pilkada ini sebelum berlangsungnya masa pelaksanaan pilkada serentak 2020

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota DPR RI Dapil Sumbar

Jakarta (18/11) — Legislator asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menganggap, regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tertuang pada UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menghambat peran serta putra terbaik daerah yang telah menjadi legislator turut serta berkompetisi menjadi kepala daerah.

Nevi menganggap, bahwa, legislator yang terdiri dari anggota DPRD Kota/kabupaten, DPRD Propinsi, DPD RI dan DPR RI harus mundur ketika hendak maju sebagai kontestan kepala daerah, akan mengurangi kualitas seleksi awal pada bursa pencalonan karena akan banyak pertimbangan para legislator akan absen pada kontestasi kepala daerah tersebut.

DAERAH PEMILIHAN

Fraksi.pks.id | Senin 18 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

t @fpksdprri

fraksi.pks.id



Legislator Harus Mundur Saat Maju Pilkada Hambat Putra Terbaik Jadi Kepala Daerah

Padahal, katanya, para legislator ini sudah memiliki langkah awal seleksi alam secara kualitas terpilih dengan kekuatan basis masa dan integritas di masyarakat sehingga mereka dapat dipercaya masyarakat mewakili daerahnya duduk sebagai legislator.

“Saat ini beberapa upaya sudah dilakukan untuk merubah regulasi legislator tidak perlu mundur, yang sebelumnya aturan tersebut pernah diperjuangkan di MK, namun tertolak oleh MK pada 28 November 2017 lalu. Upaya dari seluruh kabupaten kota yang tergabung pada asosiasi aleg sudah mulai gencar. Tinggal kesepakatan DPR dan pemerintah untuk merumuskan kembali regulasi aturan pencalonan kepala daerah ini sebagai pengganti aturan lama yang memaksa legislator yang berkesra maju pilkada harus mundur”, urai Nevi.

Politisi PKS ini berpendapat, bahwa pertimbangan yang sudah sering disampaikan oleh berbagai pihak yakni jabatan legislatif bersifat kolektif kolegial sehingga jika ada

anggota DPRD / DPD / DPR RI yang maju pilkada tidak akan mengganggu tugas kelembagaan tanpa perlu mengundurkan diri. Pada masa kampanye mereka cukup cuti tanpa menerima gaji dan segala tunjangan yang menjadi hak kedewanan. Negara ini perlu membuka ruang yang luas bagi anak bangsa, untuk mengambil peran memimpin sekaligus melayani masyarakat di daerah, siapapun mereka dengan tidak mempersulit dengan aturan yang ada.

Anggota DPR RI ini menambahkan, bahwa kepala daerah atau petahana yang akan maju sebagai kepala daerah cukup cuti saja. Regulasi ini sesuai dengan Pasal 303 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ayat 1 pasal 303 UU no. 7 tahun 2017 menyebutkan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti. Ini wajar,

karena petahana kepala daerah mesti cuti dengan maksud pemerintahan yang ditinggalkan selama masa kampanye tetap berjalan karena terjadi kekosongan pemerintahan. Tetapi bila anggota Dewan atau legislator, bahkan tidak memerlukan cuti oleh sebab tugas yang dijalankan adalah kolektif dimana keberadaannya sangat memungkinkan dapat digantikan oleh yang lain kecuali ketika ada pengambilan keputusan penting di forum paripurna.

“Saya berharap, pemerintah dan DPR mampu menyelesaikan revisi regulasi tentang pilkada ini sebelum berlangsungnya masa pelaksanaan pilkada serentak 2020. Ini menjadi ajang pemilihan putra terbaik untuk berkompete

tisi untuk menentukan orang terbaik memimpin daerah demi memberikan kontribusi kemajuan negara secara nasional”, tutup Nevi Zuairina.

Foto : dpr.go.id



Hal yang membahagiakan dan membanggakan bahwa para peserta sosialisasi 4 Pilar MPR pada hari ini yang dilaksanakan di Dapil Depok dihadiri pula para tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama seperti PGI atau lainnya yang dengan semangat yang sama ikut mendukung untuk mensosialisasikan 4 Pilar pada masyarakat dan komunitasnya

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,MA

Anggota DPR/MPR RI Dapil Jabar VI

Depok (22/11) — Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid menghadiri Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang diikuti sekitar 150 orang perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi PKS ini menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar merupakan amanah dari UU No 17 tahun 2014 bagi para anggota MPR.

"4 Pilar menjadi hal

DAERAH PEMILIHAN

Fraksi.pks.id | Jum'at 22 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Empat Pilar Jadi Amanah dan Kebanggaan Pemersatu Bangsa

penting yang harus selalu dipahamkan kepada seluruh masyarakat untuk menjawab keberagaman dan keunikan Negara Tercinta Republik Indonesia", tegas Nur Azizah.

Nur Azizah mengatakan sosialisasi memang tidak bisa tuntas menyeluruh dan utuh kepada seluruh masyarakat, harapannya kehadiran para tokoh yang mewakili setiap elemen masyarakat menjadi penyambung hal tersebut.

"Hal yang membahagiakan dan membanggakan bahwa para peserta sosialisasi 4 Pilar MPR pada hari ini yang dilaksanakan di Dapil Depok dihadiri pula para tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama seperti PGI atau lainnya yang dengan semangat yang sama ikut mendukung untuk mensosialisasikan 4 Pilar pada masyarakat dan komunitasnya", tuturnya.

Nur Azizah juga mengapresiasi kaum muda dari komunitas pemuda Kota Depok yang hadir dalam kegiatan ini, karena merekalah yang akan menjadi warna Bangsa ini ke depan, penghayatan, pemahaman dan pengalaman menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan bernegara dan tantangan di masa depan.



Bersama Ki. Bagus Hadikusumo dan KH. Wahid Hasyim. Mr. Kasman berperan besar menerima keberatan kelompok Indonesia timur atas 7 kata dalam piagam Jakarta, dan mengubahnya menjadi bunyi sila pertama Pancasila seperti sekarang ini.

Dr. HM. HIDAYAT NURWAHID, MA.

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta, Di tengah kegembiraan warga Muhammadiyah merayakan peringatan milad Muhammadiyah ke 107, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengingatkan jasa para pimpinan Muhammadiyah, dalam mengawal NKRI. Menurut politisi asal Prambanan, Klaten Jawa Tengah, ini peran pimpinan Muhammadiyah menjaga tetap utuhnya NKRI sangatlah besar.

Mr. Kasman Singodimedjo misalnya, dia adalah pimpinan Muhammadiyah, yang menguasai bidang hukum.

HNW: Sejarah Muhammadiyah, Bukti Umat Aktif Jaga Keutuhan NKRI

Kasman merupakan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Salah satu jasa besar Mr. Kasman bagi bangsa Indonesia adalah turut meletakkan dasar-dasar penyusunan konstitusi. Bersama Ki. Bagus Hadikusumo dan KH. Wahid Hasyim. Mr. Kasman berperan besar menerima keberatan kelompok Indonesia timur atas 7 kata dalam piagam Jakarta, dan mengubahnya menjadi bunyi sila pertama Pancasila seperti sekarang ini.

"Kalau saja, Mr. Kasman, Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Wahid Hasyim menolak penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta, apa jadinya Indonesia waktu itu. Mungkin umur proklamasi 17 Agustus tidak akan sepanjang sekarang," kata Hidayat menambahkan.

Selain Mr. Kasman dan Ki. Bagus Hadikusumo, kata Hidayat pimpinan Muhammadiyah yang juga berjasa terhadap NKRI adalah Panglima Besar Soedirman. Dalam kondisi sakit paru-paru yang sangat parah, Soedirman tetap berjuang memimpin perang gerilya. Dengan keberanian tersebut,



Sosialisasi Empat Pilar kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan UMI, Selasa (19/11). Foto : Istimewa)

keberadaan Indonesia masih tetap diakui dunia.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar dihadapan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan UMI, Selasa (19/11). Ikut hadir pada acara tersebut, anggota Fraksi PKS MPR RI Dr. Mardani Ali Sera M. Eng, Wakil rektor 3,

Bidang Kemahasiswaan Dr. Misiandi, M.pd, serta Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Dr. Iswan, M.si.

Selain pimpinan Muhammadiyah yang memang menguasai ilmu agama, menurut Hidayat ulama-ulama di luar Muhammadiyah juga sangat banyak yang ikut memberi kontribusi terhadap tegaknya NKRI. Sebut saja KH. Hasyim Asy' ari, ulama NU yang mencetuskan resolusi jihad sehingga muncul perlawanan

10 Oktober. Serta Muhammad Natsir, tokoh Islam yang dikenal dengan Mosi Integral. Natsir berusaha menyampaikan gagasan menolak RIS kepada Mohammad Hatta. RIS sebelumnya dikukuhkan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949 dan memecah Indonesia menjadi 16 negara bagian. Usaha Mohamad Natsir akhirnya diterima oleh Soekarno kemudian Indonesia kembali menjadi NKRI.



Tinjau Asrama Haji Makassar

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menggelar pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Kepala UPT Asrama Haji Makassar, serta Kemenag tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 15 November 2019.

Dalam pertemuan terungkap sejumlah permasalahan pelaksanaan ibadah Haji di Sulawesi Selatan,

salah satunya daftar tunggu keberangkatan Haji yang mencapai 42 tahun, yakni di Kabupaten Bantaeng, dan 41 tahun di Kabupaten Sidrap. Menanggapi hal ini, Komisi VIII DPR RI akan membahasnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama, dan mendorong agar masa tunggu dapat dipercepat.

Anggota Fraksi PKS Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA dan H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I turut serta dalam kunjungan ini. #KunkerDPR

Tinjau Pabrik Semen Petrokimia Gresik



Anggota Komisi VI Amin AK bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR melakukan peninjauan lapangan ke Pabrik PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu, 16 November 2019. #KunkerDPR

Pelaksanaan Anggaran K/L TA.2019, dan Membahas Prolegnas. Senin 18/11

Kunspek Komisi III



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap permasalahan hukum dan evaluasi penegakan hukum di Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, 15/11/2019. Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil hadir dalam agenda ini.

Raker dengan Kementan



Dr. Andi Akmal Pasluddin hadir dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober TA. 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020, dan Isu-isu Aktual, Senin, 18 November 2019. #Komisi4

RDP dengan Gubernur Lemhanas



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasryharit turut hadir bersama Komisi I DPR dalam agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lemhanas membahas Rencana Kerja Lemhanas Tahun Anggaran 2020 beserta dukungan anggarannya dan Pembahasan isu-isu aktual, Selasa, 18 November 2019

RDP dengan BPKH



Komisi VIII DPR Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Pengawas BPKH dan Bapel BPKH membahas Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2019 dan Kesiapan Pembiayaan Haji Tahun 2020, Senin, 18 November 2019. Anggota Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid Hadir dalam agenda ini.

RDP Komisi V



Anggota Komisi V DPR Ahmad Syaikhul dalam RDP dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan BPWS membahas Penyampaian Renstra dan Program Kerja Pemerintah 5 Tahun Kedepan. Evaluasi

Rapat dengan KPAI



Komis VIII DPR Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPAI Membahas Hasil Pengawasan KPAI terhadap Perlindungan Anak dan Rekomendasinya, Senin, 18 November 2019. Anggota Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid dan KH Bukhori Yusuf hadir dalam agenda ini.

BAKN di Aceh



BAKN DPR Kunjungi Aceh Terkait Dana Otsus] Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi

Aceh, membahas telaahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2019 terkait Dana Otsus Aceh di Provinsi Aceh, Rabu, 20 November 2019.

RDP Komisi I



Anggota Komisi I Sukamta berbicara dalam Rapat Komisi I DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI membahas Rencana Kerja LPP RRI Tahun 2020 beserta anggarannya dan pembahasan isu-isu aktual, Rabu, 20 November 2019

Rapat Komisi VI



Komis VI DPR RI RDPU dengan Pakar dan Akademisi untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Rabu, 20 November 2019. hadir dalam agenda ini Anggota Fraksi PKS Hj. Nevi Zuarina dan Rafli

Raker Komisi V



Komis V DPR RI Raker dengan Menteri PUPR Menhub membahas Kesiapan Infrastruktur Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Rabu, 20 November 2019. turut hadir Anggota Fraksi PKS Suryadi Jaya Permana

Kunjungi PT Sritex



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyari meninjau kesiapan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (PT. Sritex) dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis, 21 November 2019.

Kunspek Komisi XI

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Amir Uskara menggelar pertemuan dengan Kanwil Pajak, Kanwil Bea Cukai, Kanwil Perbendaharaan Sulsebartra membahas realisasi penerimaan negara tahun 2017-2019 di Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara di Gedung Keuangan, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 15 November 2019. Anggota FPKS Anis Byarwati hadir pula dalam acara ini



Kunjungi PT Petro Kimia Gresik



Baleg DPR Gali Masukan Prolegnas



Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi

Anggota Fraksi PKS Amin Ak bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke Pabrik PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu, 16 November 2019

Kunker Komisi IV ke SUMUT



Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Karantina dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengetahui upaya Karantina Pertanian dalam antisipasi dan penanganan penyakit Hog Cholera dan ASF, Jumat, 22 November 2019

Nasional Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 18 November 2019.

PROFIL

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Sahabat dan rekan Netizen yang budiman, .Kali ini kita akan berkenalan dengan #KeluargaPKS Mulyanto Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan (Inbang). Anggota DPR yang terpilih dari Daerah Pemilihan

(Dapil) Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Pribadi yang kalem dan bersahabat. Mulyanto memiliki tiga orang anak dari istri bernama Ritta Purbowati, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 26

Mei 1963.

Mulyanto lama berkecimpung di dunia birokrasi hingga mencapai jabatan strategis seperti Inspektur Jenderal Deptan; Sekretaris Kementerian Ristek; Komisaris Utama BUMN PT Pertamina; dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I.

Doktor Teknik Nuklir lulusan Jepang ini lama berkecimpung di dunia birokrasi, selepas pensiun kemudian menjadi Anggota DPR. Meski semakin sibuk, Mulyanto tidak pernah alpa untuk menyempatkan bertemu keluarga di pagi hari.

Keluarga bagi Mulyanto merupakan sesuatu yang berharga dan teman perjuangan, keberadaannya melengkapi banyak hal dalam hidupnya. Menemani saat-saat perjuangan menem-puh studi di Jepang guna me-raih gelar magiste dan doktor.

Kunjungi Pak Mulyanto di laman :
<https://fraksi.pks.id/2019/11/07/anggota-dpr-ri-dr-h-mulyanto-m-eng/>

Facebook

Mulyanto
<https://www.facebook.com/mulyanto63>

Fanpage FB

Pak Mul

Website

Pakmul.id



Keluarga
adalah teman
dalam
PERJUANGAN



”

Lukisan
yang paling
indah adalah
keluarga





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI